

PERAN STANDAR AKUNTANSI PEMERINTAHAN DAN SISTEM PENGENDALIAN INTERNAL TERHADAP KUALITAS INFORMASI LAPORAN KEUANGAN DAN AKUNTABILITAS KEUANGAN

Nur Fitri Dewi^{1*}

¹Universitas Global Jakarta, Indonesia

*Corresponding author: nurfitridewi@jgu.ac.id

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji pengaruh standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah serta bagaimana dampaknya terhadap akuntabilitas keuangan. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah kuesioner yang disebarakan kepada 50 sampel Badan Keuangan Daerah Kota Depok. Data yang terkumpul diolah menggunakan SPSS 27.00 dengan uji t dan Path Analysis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern berpengaruh positif terhadap laporan keuangan pemerintah daerah. Standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian intern juga berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan baik secara langsung maupun tidak langsung yang dimediasi oleh kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh langsung dan positif terhadap akuntabilitas keuangan. Hasil penelitian ini dapat bermanfaat bagi pemerintah sebagai masukan dan pertimbangan dalam menentukan kebijakan khususnya mengenai peningkatan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah dan akuntabilitas keuangan.

Kata Kunci: Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Informasi Laporan Keuangan, Akuntabilitas

Abstract

This research aims to examine the influence of government accounting standards and internal control systems on the quality of local government financial report information and their impact on financial accountability. The data collection method used was a questionnaire distributed to 50 samples of the Depok City Regional Financial Agency. The collected data was processed using SPSS 27.00 with t-test and Path Analysis. The research results show that government accounting standards and internal control systems have a positive effect on local government financial reports. Government accounting standards and internal control systems also have a positive effect on financial accountability, both directly and indirectly, mediated by the quality of local government financial report information. In addition, the quality of local government financial report information has a direct and positive effect on financial accountability. The results of this research can be useful for the government as input and consideration in determining policies, especially regarding improving the quality of information on government financial reports and financial accountability.

Keywords: Government Accounting Standards, Internal Control Systems, Quality of Financial Report Information, Accountability

PENDAHULUAN

Perusahaan Reformasi terhadap Undang-Undang dalam hal pengelolaan keuangan negara terus dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai pengelolaan keuangan yang baik. Reformasi ini diterbitkan demi tercapainya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan daerah. Disebutkan oleh Menteri Administrasi Reformasi dan Reformasi Birokrasi Indonesia, Asman Abnur, bahwa mayoritas pemerintah daerah saat ini memiliki nilai akuntabilitas yang berada di bawah standar, yaitu di bawah kategori B, selama tahun 2016 (Dewi, 2023). Menurut Zeyn (2011), bentuk pertanggungjawaban lembaga publik terkait penggunaan dana publik secara ekonomis, efisien, dan efektif, tanpa terjadi pemborosan dan kebocoran dana, serta korupsi disebut sebagai akuntabilitas keuangan. PP Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, yang mengatur tata kelola keuangan negara, diterbitkan oleh pemerintah dalam rangka menyempurnakan peraturan yang telah ditetapkan sebelumnya. Peraturan Pemerintah ini harus dijadikan acuan oleh semua entitas pelaporan dalam penyajian laporan keuangan sebagai bentuk pertanggungjawaban kepada pihak yang bersangkutan. Akuntabilitas pengelolaan keuangan Pemerintah Daerah akan terwujud melalui penyusunan laporan keuangan yang memenuhi prinsip yang telah ditetapkan dan disajikan sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintahan.

Bentuk perwujudan akuntabilitas dalam hal pengelolaan keuangan diwujudkan melalui penyajian laporan keuangan (Iskandar & Setiyawati, 2015). Hasil akhir dari tahap identifikasi, pencatatan, dan pengukuran dari berbagai transaksi oleh instansi pemerintah dituangkan dalam laporan keuangan, yang menjadi sumber informasi untuk pertanggungjawaban tata kelola keuangan dan acuan pengambilan keputusan oleh pihak eksternal pemerintah daerah. Standar Akuntansi Pemerintah (SAP) menjadi dasar penyusunan laporan keuangan pemerintah daerah (Standar Akuntansi Pemerintahan, 2021). Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) wajib disampaikan oleh pemerintah daerah sebagai bentuk pertanggungjawaban tata kelola keuangan daerah. Informasi yang relevan tentang posisi keuangan dan transaksi yang dilaksanakan selama satu periode pelaporan termuat dalam LKPD. Realisasi pendapatan dan belanja dibandingkan dengan anggaran sebelumnya, efektivitas pemerintah daerah dinilai, kondisi keuangan entitas dievaluasi, dan ketaatan pemerintah daerah terhadap peraturan perundang-undangan ditentukan melalui LKPD. Peraturan Pemerintah No. 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan menetapkan karakteristik kualitatif laporan keuangan, yaitu relevan, andal, dapat dibandingkan, dan dapat dipahami (Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan, 2010).

Salah satu indikator kualitas akuntabilitas keuangan atas penyajian laporan keuangan pemerintah ditunjukkan oleh opini dari pemeriksa eksternal (BPK) (Idris et al., 2018). Opini BPK terdiri dari: Tidak Wajar (TW), Tidak Memberikan Pendapat (TMP), Wajar Dengan Pengecualian (WDP), dan yang terbaik adalah Wajar Tanpa Pengecualian (WTP). Fakta yang terjadi berdasarkan hasil pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) atas 542 LKPD yang dilaporkan dalam Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester (IHPS) I Tahun 2023, ditemukan 7.661 temuan yang berisi 12.855 permasalahan terkait kelemahan sistem pengendalian intern (SPI) dan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan. Permasalahan tersebut meliputi 5.628 kelemahan SPI dan 7.227 ketidakpatuhan yang berdampak finansial sebesar Rp3,07 triliun (BPK RI, 2023). Kelemahan sistem pengendalian intern terjadi karena pegawai masih lalai dan kurang cermat dalam menaati peraturan, pelaksanaan tugas dan tanggung jawab yang belum optimal, pengawasan dan

pengendalian yang masih lemah, belum ada prosedur untuk kegiatan operasional, serta belum ada proses tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK tahun sebelumnya.

Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sebanyak 12 kali berturut-turut telah diperoleh oleh Pemerintah Kota Depok. Namun, banyak permasalahan yang masih ditemukan menandakan bahwa pemerintah Kota Depok memiliki banyak kelemahan. Berdasarkan Resume Hasil Pemeriksaan atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan Kota Depok Tahun 2020, ditemukan kelemahan pengendalian intern dan ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pemeriksaan Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun 2020 (BPK RI, 2021). Adapun fenomena lain terkait laporan keuangan dan sumber daya manusia yang terlibat, seperti kasus korupsi pajak pada tahun 2021, yang melibatkan penerbitan dan penggunaan faktur pajak, bukti pemungutan pajak, bukti pemotongan pajak, serta bukti setoran pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya, sehingga menyebabkan kerugian pada pendapatan negara sebesar Rp 21.214 miliar (Rajaguguk, 2021).. Pada tahun sebelumnya, yaitu tahun 2020, dalam Laporan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI, ditemukan temuan terkait dana Hibah sebesar Rp 1 miliar yang belum dipertanggungjawabkan (Redaksi Kabar Depok, 2020).. Hal ini bertentangan dengan Peraturan Walikota Depok Nomor 66 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian dan Pertanggungjawaban Hibah dan Bantuan Sosial. Fakta-fakta tersebut tidak sesuai dengan Peraturan Reformasi Nomor 15 Tahun 2004 yang mengatur kriteria pemberian opini atas laporan keuangan sebagai salah satu indikator kualitas laporan keuangan.

Berdasarkan permasalahan yang ada di lapangan dan teori yang dijelaskan, beberapa faktor yang mungkin mempengaruhi kualitas pelaporan keuangan diidentifikasi, seperti penerapan Standar Akuntansi Pemerintah (Yaqin & Jatmiko, 2018) dan efektivitas pengendalian internal (Nurlis & Yadiati, 2017). Penerapan Standar Akuntansi dapat memberikan dampak positif terhadap kualitas laporan keuangan, yang mampu menghasilkan laporan yang berkualitas, bermutu, dan menyediakan informasi lengkap (Hendri & NR, 2020). Sebaliknya, lemahnya penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan dapat memberikan dampak negatif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah. Selain itu, Sistem Pengendalian Intern didefinisikan oleh PP Nomor 60 Tahun 2008 sebagai suatu proses integral dari tindakan dan kegiatan yang dilaksanakan secara berkelanjutan oleh manajemen dan para pegawai untuk memberikan keyakinan yang wajar atas terwujudnya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan aset negara, dan kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan (PP Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, 2008). Penelitian yang dilaksanakan oleh Mahardini & Miranti (2018) menunjukkan bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015. Hal ini bertolak belakang dengan penelitian oleh Adha Inapty & Martiningsih (2016) dimana penerapan standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal tidak berpengaruh terhadap kualitas informasi laporan keuangan.

Fenomena yang terjadi terkait kelemahan dan kelebihan serta pro kontra standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah yang mempengaruhi pencapaian akuntabilitas keuangan menarik peneliti untuk mengkaji topik tersebut. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran kepada pemerintah Kota Depok untuk memaksimalkan standar akuntansi pemerintahan yang ada serta meningkatkan sistem pengendalian internal yang dimiliki, sehingga dapat menghasilkan informasi yang

berkualitas dari laporan keuangan dan meningkatkan akuntabilitas keuangan daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian kuantitatif dengan data primer dan teknik pengumpulan data menggunakan kuesioner. Seluruh pegawai yang bekerja pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok dijadikan populasi dalam penelitian ini. Teknik penentuan sampel menggunakan metode nonprobability sampling dengan pendekatan purposive sampling, yaitu teknik pengambilan sampel sumber data dengan pertimbangan tertentu (Sugiyono, 2016). Staf atau pegawai yang melaksanakan fungsi akuntansi atau keuangan pada Badan Keuangan Daerah Pemerintah Kota Depok dijadikan sampel dalam penelitian ini, dengan jumlah 50 sampel. Kriteria yang dipilih adalah pegawai yang telah bekerja minimal 1 tahun, dengan pertimbangan bahwa staf bagian akuntansi maupun bagian keuangan pada dinas merupakan pihak yang terlibat langsung dalam proses pencatatan transaksi keuangan dinas dan bertugas menghasilkan laporan keuangan pemerintah. Metode pengukuran variabel yang digunakan dapat dilihat pada tabel 1 berikut:

Tabel 1. Definisi Operasional Variabel

No.	Variabel	Indikator	Skala Pengukuran
1.	Standar Akuntansi Pemerintahan (X ₁)	1. Penyajian Laporan Keuangan 2. Laporan Realisasi Anggaran Berbasis Kas 3. Laporan Arus Kas 4. Catatan atas Laporan Keuangan 5. Akuntansi Persediaan 6. Akuntansi Investasi 7. Akuntansi Aset tetap 8. Akuntansi Konstruksi dalam pengerjaan 9. Akuntansi Kewajiban 10. Koreksi Kesalahan 11. Laporan Keuangan Konsolidasian 12. Laporan Operasional (PP No. 71 Tahun 2010)	Skala Likert 1-5
2.	Sistem pengendalian intern (X ₂)	1. Lingkungan pengendalian 2. Penilaian risiko 3. Aktivitas pengendalian 4. Informasi dan komunikasi 5. Pemantauan (PP No. 60 Tahun 2008, Sudiaranti (2015))	Skala Likert 1-5
3.	Kualitas informasi laporan keuangan (Y)	1. Relevan 2. Andal 3. Dapat dibandingkan 4. Dapat dipahami (PP No. 71 Tahun 2010, Sudiaranti (2015))	Skala Likert 1-5
4.	Akuntabilitas Keuangan (Z)	1. Perumusan rencana keuangan (proses penganggaran) 2. Pelaksanaan dan pembiayaan kegiatan 3. Evaluasi kinerja keuangan 4. Pelaksanaan pelaporan keuangan (Zeyn, 2011)	Skala Likert 1-5

Sumber: PP No. 71 Tahun 2010, PP No. 60 Tahun 2008, Sudiaranti (2015), Zeyn (2011)

Teknik analisis data dalam penelitian ini yaitu menggunakan uji signifikansi parsial (uji-t) untuk menguji hipotesis apakah benar atau salah dan selanjutnya dianalisis dengan Path Analysis. Menurut Ghozali (2011) path analysis dinyatakan sebagai perluasan dari analisis regresi berganda, atau dengan kata lain, path analysis digunakan untuk memperkirakan hubungan kausalitas antara variabel yang telah ditentukan berdasarkan teori. Dalam path analysis, model akan memiliki dua persamaan, yang dapat digambarkan sebagai berikut:

Persamaan Struktural 1:

$$Y = pYX_1 + pYX_2 + e_1 \quad (1)$$

Persamaan Struktural 2:

$$Z = pZX_1 + pZX_2 + pZY + e_2 \quad (2)$$

Dimana:

X_1 = Standar Akuntansi Pemerintahan

X_2 = Sistem pengendalian Internal

Y = Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Z = Akuntabilitas Keuangan

Selanjutnya untuk melengkapi persamaan struktural adalah dengan menghitung Koefisien Jalur. Penghitungan Koefisien Jalur dilakukan dengan menggunakan rumus (Dewi et al., 2019):

$$e1 = \sqrt{1 - R^2}$$

$$e2 = \sqrt{1 - R^2}$$

HASIL DAN PEMBAHASAN

Uji t atau uji parsial bertujuan untuk menguji hipotesis dalam penelitian ini, baik pada Persamaan (1) atau dalam Persamaan (2). Ujian menggunakan tingkat signifikansi 0,05. Nilai t tabel pada Persamaan (1) adalah $df = 47$ ($df = 50 - 2 - 1$) dan nilainya dari t tabel dalam Persamaan (2) adalah $df = 46$ ($df = 50 - 3 - 1$). Hasil uji t dapat dilihat pada Tabel 2 dan Tabel 3 sebagai berikut:

Tabel 2. Hasil Uji t Persamaan - 1

Model	Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
1 (Constant)	20.729	4.759		4.356	.000
Standar Akuntansi Pemerintahan	.231	.095	.281	2.435	.019
Sistem Pengendalian Internal	.271	.054	.579	5.011	.000

a. Dependent Variable: Kualitas Informasi Laporan Keuangan

Sumber: Hasil pengolahan data IBM SPSS Statistics 27

Tabel 2 menunjukkan pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah secara parsial. Sedangkan hasil uji-t pada Persamaan 2 bisa terlihat pada Tabel 3. Tabel 3 menunjukkan hasil pengujian yang diberikan pada Persamaan 2 dimana hal tersebut menunjukkan pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap

Akuntabilitas Keuangan.

Tabel 3. Hasil Uji t Persamaan - 2

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	.193	5.784		.033	.974
	Standar Akuntansi Pemerintahan	.348	.103	.398	3.398	.001
	Sistem Pengendalian Internal	.131	.069	.267	1.898	.065
	Kualitas Informasi Laporan Keuangan	.284	.154	.262	1.841	.073

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Keuangan

Sumber: Hasil pengolahan data IBM SPSS Statistics 27

Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

Berdasarkan uji signifikansi parsial (Tabel 2) diperoleh nilai t hitung 2.435 lebih besar dari t table yang telah diperoleh sebelumnya yaitu sebesar 1.678 ($2.435 > 1.678$) dengan nilai signifikansi $0,019 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah

Hasil uji signifikansi parsial (Tabel 2) memperoleh nilai t hitung lebih besar dari t table yang telah diperoleh sebelumnya yaitu sebesar 1.678 ($5.011 > 1.678$) dengan nilai signifikansi $0,000 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif signifikan terhadap kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah.

Standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan

Berdasarkan uji signifikansi parsial (Tabel 3) diperoleh nilai t hitung 3.398 lebih besar dari t table yang telah diperoleh sebelumnya yaitu sebesar 1.679 ($3.398 > 1.679$) dengan nilai signifikansi $0,001 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Sistem pengendalian internal berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan

Hasil uji signifikansi parsial (Tabel 3) memperoleh nilai t hitung lebih besar dari t table yang telah diperoleh sebelumnya yaitu sebesar 1.679 ($1.898 > 1.679$) dengan nilai signifikansi $0,065 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem pengendalian internal berpengaruh positif namun tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif terhadap akuntabilitas keuangan

Berdasarkan uji signifikansi parsial (Tabel 3) diperoleh nilai t hitung 1.841 lebih besar dari t table yang telah diperoleh sebelumnya yaitu sebesar 1.679 ($1.841 > 1.679$) dengan nilai signifikansi $0,073 < 0,05$. Berdasarkan hasil tersebut dapat disimpulkan

bahwa kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah berpengaruh positif tidak signifikan terhadap akuntabilitas keuangan.

Path Analysis

Tabel 4. Koefisien Determinasi Persamaan - 1

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.765 ^a	.586	.566	3.166

a. Predictors: (Constant), Sistem Pengendalian Internal, Standar Akuntansi Pemerintahan

Sumber: Hasil pengolahan data IBM SPSS Statistics 27

Berdasarkan Tabel 4 diatas, untuk menghitung koefisien jalur digunakan rumus sebagai berikut:

$$e_1 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0.586} = 0.64343$$

Sehingga Persamaan Struktural 1 berdasarkan Tabel 2 dan Tabel 4 di atas, dapat diketahui sebagai berikut:

$$Y = 0.281 X_1 + 0.579 X_2 + 0.64343 e_1$$

Tabel 5. Koefisien Determinasi Persamaan - 2

Model Summary				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.797 ^a	.635	.608	3.206

a. Predictors: (Constant), Kualitas Informasi Laporan Keuangan, Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal

Sumber: Hasil pengolahan data IBM SPSS Statistics 27

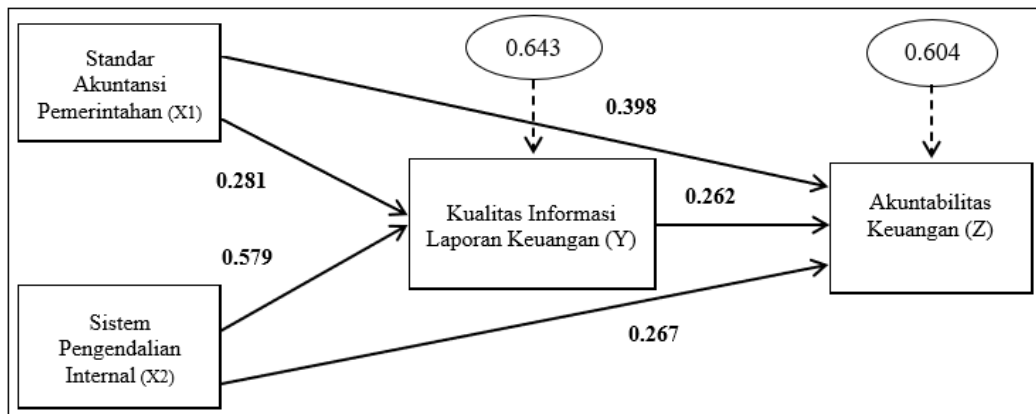
Berdasarkan Tabel 5, untuk menghitung koefisien jalur digunakan rumus sebagai berikut:

$$e_2 = \sqrt{1 - R^2} = \sqrt{1 - 0.635} = 0.60415$$

Sedangkan Persamaan Struktural 2 berdasarkan Tabel 3 dan Tabel 5 di atas, dapat diketahui sebagai berikut:

$$Z = 0.398 X_1 + 0.262 X_2 + 0.267Y + 0.60415 e_2$$

Sehingga persamaan struktural tersebut dapat diperjelas dengan ilustrasi dengan model struktur Path Analysis sebagai berikut.



Gambar 1. Hasil Pengujian Hipotesis

Tabel berikut ini akan menjelaskan pengaruh langsung, pengaruh tidak langsung, dan koefisien jalur dari masing-masing variabel yang dapat dipengaruhi.

Tabel 6. Hasil Path Analysis Persamaan 1 dan Persamaan 2 untuk Pengaruh Langsung dan Pengaruh Tidak Langsung

Variabel	Path	Pengaruh Langsung	Pengaruh Tidak Langsung	Total
X1 ke Y		0.281		0.281
X2 ke Y		0.579		0.579
Y ke Z		0.262		0.262
X1 ke Z		0.398	$0.281 \times 0.262 = 0.0736$	0.4716
X2 ke Z		0.267	$0.579 \times 0.267 = 0.1545$	0.4215
e1	0.64343			0.64343
e2	0.60415			0.60415

Sumber: Hasil pengujian hipotesis

Berikut dapat diuraikan hasil Path Analysis persamaan 1 dan persamaan 2 untuk pengaruh langsung dan pengaruh tidak langsung:

Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Koefisien pengaruh langsungnya adalah 0.281 dan signifikansinya 0.019. Artinya setiap penyempurnaan Standar Akuntansi Pemerintahan akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0.281 atau 28.1%. Penerapan standar akuntansi pemerintahan yang baik dan efektif pada pemerintah Kota Depok akan cenderung memberikan informasi laporan keuangan yang berkualitas dan mampu mendukung peningkatan kualitas informasi pada laporan keuangan. Hasil penelitian ini mendukung data hasil pemeriksaan BPK atas laporan keuangan Pemerintah Kota Depok Tahun Anggaran 2022 dimana Laporan Keuangan Pemerintah Daerah harus sesuai dengan ketentuan yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan serta ditindaklanjuti melalui Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013, yaitu Laporan Keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan (SAP) Berbasis Akrua dimana SAP yang mengakui pendapatan, beban, aset, utang, dan ekuitas dalam pelaporan finansial berbasis akrual, serta mengakui pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam pelaporan pelaksanaan anggaran berdasarkan basis yang ditetapkan dalam APBD (BPK RI, 2022).

Sesuai dengan SAP tersebut, maka Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022 terdiri dari Laporan Realisasi Anggaran (LRA), Laporan Perubahan Saldo

Anggaran Lebih (LPSAL), Neraca, Laporan Operasional (LO), Laporan Arus Kas (LAK), Laporan Perubahan Ekuitas (LPE), dan Catatan atas Laporan Keuangan (CaLK). Hasil ini didukung juga oleh penyajian laporan keuangan pemerintah Kota Depok pada tahun 2022 yang telah sesuai ketentuan yang berlaku yaitu menggunakan sistem akuntansi berbasis akrual. Hasil pengujian hipotesis ini secara empiris mendukung penelitian yang dilakukan oleh Mahardini & Miranti (2018) bahwa penerapan standar akuntansi pemerintahan berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan Pemerintah Provinsi Banten Tahun Anggaran 2015.

Sistem Pengendalian Internal (X2) secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y). Koefisien pengaruh langsung sebesar 0,579 dan signifikansi sebesar 0000. Artinya sistem pengendalian internal akan meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah sebesar 0.579 atau sebesar 57.9%. Semakin baik sistem pengendalian internal pada pemerintah Kota Depok, maka cenderung semakin baik kualitas informasi laporan keuangan yang dihasilkan oleh pemerintah Kota Depok, Jawa Barat. Hasil ini mendukung ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 yang menguraikan Sistem Pengendalian Intern sebagai sebuah proses menyeluruh yang mencakup tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara berkesinambungan oleh para pimpinan dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan yang memadai dalam mencapai tujuan organisasi. Penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian oleh Yaqin & Jatmiko (2018) dimana sistem pengendalian internal pemerintah berpengaruh positif terhadap kualitas laporan keuangan pemerintah SKPD Kabupaten Biak Numfor.

Standar Akuntansi Pemerintahan (X1) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan (Z) baik secara langsung maupun tidak langsung. Koefisien pengaruh langsung sebesar 0.398 sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 0.073. Hal ini berarti apabila Standar Akuntansi Pemerintahan meningkat maka Akuntabilitas Keuangan juga akan meningkat. Baik secara langsung maupun melalui mediasi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Hasil pengujian hipotesis ini secara empiris mendukung penelitian oleh Ichlas et al., (2014) yang menyatakan bahwa penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan berpengaruh terhadap akuntabilitas keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. Setiap entitas pelaporan, termasuk Pemerintah Kota Depok, diwajibkan untuk melaporkan upaya-upaya yang telah dilakukan dalam rangka penerapan SAP serta hasil yang dicapai dalam pelaksanaan kegiatan secara sistematis dan terstruktur pada suatu periode pelaporan untuk kepentingan akuntabilitas, manajemen, transparansi, keseimbangan antar generasi, dan evaluasi kinerja.

Sistem Pengendalian Internal (X2) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan (Z) baik secara langsung maupun tidak langsung. Koefisien pengaruh langsung sebesar 0.267 sedangkan pengaruh tidak langsung sebesar 0.154. Hasil ini menunjukkan bahwa apabila Sistem Pengendalian Internal meningkat maka Akuntabilitas Keuangan juga akan meningkat. Baik secara langsung maupun melalui mediasi Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Secara empiris hasil ini mendukung penelitian oleh Purbasari & Bawono (2017) yang menyebutkan bahwa sistem pengendalian internal memiliki pengaruh signifikan terhadap akuntabilitas laporan keuangan. Namun sebaliknya hasil uji hipotesis ini tidak sesuai dengan penelitian oleh Kartika (2013) dimana sistem pengendalian intern pemerintah tidak memiliki pengaruh langsung terhadap akuntabilitas keuangan Kabupaten Wilayah Provinsi Jawa Barat.

Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) berpengaruh positif terhadap Akuntabilitas Keuangan (Z). Koefisien pengaruh langsung sebesar 0.262. Artinya jika informasi pemerintah daerah berkualitas laporan keuangan

meningkat maka akuntabilitas keuangan juga akan meningkat. Setiap peningkatan pada kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah akan meningkatkan akuntabilitas keuangan sebesar 0.262 atau sebesar 26.2%. Hasil ini mendukung pernyataan Asuquo (2014); Chalam & Ng'eni (2017) bahwa untuk memberdayakan pemerintah daerah agar bekerja secara produktif dan efisien, diperlukan pengelolaan keuangan yang baik dan akuntabilitas untuk setiap aset yang tersedia.

Variabel yang paling berpengaruh terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Y) adalah Sistem Pengendalian Internal (X2), sedangkan variabel yang berpengaruh terhadap Akuntabilitas Keuangan (Z) adalah Standar Akuntansi Pemerintahan (X1). Berdasarkan Tabel 4 diperoleh nilai Adjusted R Square = $0.566 = 56.6\%$. Hal ini berarti besarnya pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah adalah sebesar 56.6% dan sisanya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini. Berdasarkan Tabel 5 diperoleh nilai Adjusted R Square = $0.608 = 60.8\%$. Ini menunjukkan bahwa besarnya pengaruh Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Internal, Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah terhadap Akuntabilitas Keuangan sebesar 60.8% dan selebihnya dipengaruhi oleh variabel lain yang tidak dimasukkan dalam penelitian ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan penelitian yang dilakukan di Badan Keuangan Daerah Kota Depok, Jawa Barat, terdapat beberapa isu yang dapat diidentifikasi. Pertama, ditemukan bahwa Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal memiliki pengaruh yang positif signifikan terhadap Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah di Pemerintah Kota Depok. Kemudian, pengaruh positif juga ditunjukkan oleh Standar Akuntansi Pemerintahan dan Sistem Pengendalian Internal terhadap Akuntabilitas Keuangan di Pemerintah Kota Depok, baik yang dimediasi secara langsung maupun tidak langsung oleh Kualitas Informasi Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Literatur akuntansi yang ada dapat dikembangkan dan penelitian sebelumnya terkait Akuntabilitas Keuangan serta faktor-faktor yang mempengaruhinya dapat diperkuat oleh temuan penelitian ini. Selain itu, bukti empiris bagi akademisi dan pertimbangan untuk penelitian lebih lanjut juga dapat diberikan oleh hasil penelitian ini.

Berdasarkan perspektif implikasi praktis, masukan dan bahan pertimbangan dalam menentukan kebijakan, terutama terkait peningkatan kualitas informasi laporan keuangan dan akuntabilitas keuangan, dapat diberikan oleh hasil penelitian ini kepada Pemerintah Kota Depok. Rekomendasi yang bisa diberikan oleh peneliti adalah diharapkan Pemerintah Kota Depok melakukan berbagai peningkatan dalam hal standar akuntansi pemerintahan dan sistem pengendalian internal untuk meningkatkan kualitas informasi laporan keuangan pemerintah daerah yang lebih optimal, sehingga dapat meningkatkan akuntabilitas keuangan. Selain itu, peneliti menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penelitian ini karena beberapa keterbatasan. Penelitian ini hanya dilakukan di Badan Keuangan Daerah, Kota Depok, Jawa Barat, sehingga hasilnya tidak dapat digeneralisasikan untuk semua objek. Oleh karena itu, diharapkan penelitian selanjutnya dapat memperluas cakupan penelitian ke daerah lain dan menggunakan sampel yang lebih bervariasi agar penelitian menjadi lebih akurat.

DAFTAR PUSTAKA

Adha Inapty, M. A. F. B., & Martiningsih, R. S. P. (2016). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah, Kompetensi Aparatur Dan Peran Audit Internal Terhadap

- Kualitas Informasi Laporan Keuangan Dengan Sistem Pengendalian Intern Sebagai Variabel Moderating (Studi Empiris Pada SKPD Di Pemprov NTB). *Akuntabilitas*, 9(1). <https://doi.org/10.15408/Akt.V9i1.3583>
- BPK RI. (2021). Resume Hasil Pemeriksaan Atas Sistem Pengendalian Intern dan Kepatuhan terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan.
- BPK RI. (2022). Laporan Keuangan Pemerintah Kota Depok TA 2022.
- BPK RI. (2023). Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Semester I Tahun 2023.
- Chalam, G. V., & Ng'eni, F. B. (2017). Financial Accountability and Financial Reporting in a Decentralized Environment (A Case Study of Tanzanian Local Government Authorities). *International Journal of Management (IJM)*, 8(3), 14–31.
- Dewi, N. F. (2023). Determinan Akuntabilitas Keuangan Dengan Kualitas Informasi Laporan Keuangan Sebagai Variabel Intervening Pada Badan Keuangan Daerah Kota Depok. *JAMER: Jurnal Akuntansi Merdeka*, 4(2), 84–91. <https://doi.org/10.33319/jamer.v4i2.103>
- Dewi, N. F., Ferdous Azam, S. M., & Yusoff, S. K. M. (2019). Factors influencing the information quality of local government financial statement and financial accountability. *Management Science Letters*, 9(9), 1373–1384. <https://doi.org/10.5267/j.msl.2019.5.013>
- Ghozali, I. (2011). Aplikasi Analisis Multivariate Dengan Program SPSS. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Hendri, M., & NR, E. (2020). Pengaruh Kualitas Sumber Daya Manusia, Implementasi Sistem Informasi Manajemen Daerah Dan Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (Studi Empiris Pada OPD Provinsi Sumatera Barat). *Jurnal Eksplorasi Akuntansi*, 2(1), 2479–2493.
- Ichlas, M., Basri, H., & Arfan, M. (2014). Pengaruh Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan, Sistem Pengendalian Intern Pemerintah Dan Aksesibilitas Laporan Keuangan Terhadap Akuntabilitas Keuangan Pemerintah Kota Banda Aceh. *Jurnal Magister AKuntansi*, 3(4), 76–84.
- Idris, A. L., Surasni, N. K., & Irwan, M. (2018). The Determinant Disclosure of Internet Financial Reporting in District and City Government in Indonesia. 62–74.
- Iskandar, D., & Setiyawati, H. (2015). The Effect of Internal Accountants' Competence on the Quality of Financial Reporting and the Impact on the Financial Accountability. *International Journal of Managerial Studies and Research (IJMSR)*, 3(5), 55–64. www.arcjournals.org
- Kartika, I. (2013). Pengaruh Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Spip) Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Dan Implikasinya Terhadap akuntabilitas Keuangan. Universitas Pendidikan Indonesia.
- Mahardini, N. Y., & Miranti, A. (2018). Dampak Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Dan Kompetensi Sumber Daya Manusia Pada kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bantentahun Anggaran 2015. *Jurnal Akuntansi*, 5(1), 22–32.
- Nurlis, & Yadiati, W. (2017). The Influence of Internal Control Effectiveness, Information Technology Utilization and Human Resources Competence on Local Government Financial Reporting Quality (Survey on SKPD Banten Provincial Government and Serang City). *Research Journal of Finance and Accounting IISTE*, 8(12). www.iiste.org
- Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 Tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (2008).

- Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 Tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (2010).
- Priyatno, D. (2012). Cara Kilat Belajar Analisis Data dengan SPSS 20. Andi.
- Purbasari, H., & Bawono, A. D. B. (2017). Pengaruh Desentralisasi Fiskal, Sistem Pengendalian Internal Dan Kinerja Pemerintah Daerah Terhadap akuntabilitas Laporan Keuangan. *Riset Akuntansi Dan Keuangan*, 102–108.
- Rajaguguk, K. (2021). Korupsi Pajak di Depok Divonis 4 Tahun Bui dan Denda Rp42 Miliar. <https://mediaindonesia.com/megapolitan/376577/korupsi-pajak-di-depok-divonis-4-tahun-bui-dan-denda-rp42-miliar>
- Redaksi Kabar Depok. (2020). Ada Temuan BPK, FORMAT Minta KONI Transparan. <https://depoknetwork.com/kabar-depok/ada-temuan-bpk-format-minta-koni-transparan/>
- Standar Akuntansi Pemerintahan (2021).
- Sudiarianti. (2015). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia pada Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah dan Standar Akuntansi Pemerintah Serta Implikasinya pada Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. Universitas Udayana.
- Sugiyono. (2016). Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, R&D. IKAPI.
- Yaqin, A., & Jatmiko, B. (2018). Kontribusi Kompetensi Sumber Daya Manusia, Standar Akuntansi Pemerintah, Dan Sistem Pengendalian Internal Pemerintah Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah: Studi Kasus Pada Satuan Kerja Perangkat Daerah Kab. Biak Numfor. *Reviu Akuntansi Dan BisnisIndonesia*, 2(1), 1–10.
- Zeyn, E. (2011). Pengaruh good governance dan standar akuntansi pemerintahan terhadap akuntabilitas keuangan dengan komitmen organisasi sebagai pemoderasi. *Jurnal Reviu Akuntansi Dan Keuangan*, 1(1).